

LAPORAN KINERJA (LKJ)

KEPALA BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

TRIWULAN III



TAHUN 2025

Jalan Alun-Alun Utara Nomor : 07 Telepon/Fax: (0334) 884278 Kode Pos 67316



BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud. Sebagaimana amanat peraturan Menteri PAN&RB No.53 tahun 2014 jo. Pasal 3 dan 4 Perbub no.6 tahun 2018 disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan LKJ.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan III Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Penyusunan rumusan atau petunjuk teknis terkait fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
- 5) Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi,
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.



1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 16 orang (kondisi per 1 Juli 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

NO	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	AKHMAD FAISHOL, S.Sos.	PNS	IV/b - Pembina Tingkat I	S-1
2	HARYONO SUBIYANTO, S.Si, M.Pd.I	PNS	IV/a - Pembina	S-2
3	HOPIN	PNS	II/c - Pengatur	SLTA
4	IMAM TURMUDI	PNS	II/a - Pengatur Muda	SLTA
5	ISMAIL, S.AP	PNS	III/a - Penata Muda	S-1
6	MUKHAMMAD RIYADI	PNS	II/d - Pengatur Tingkat I	SLTA
7	SUGENG HANDOKO	PNS	II/a - Pengatur Muda	SLTA
8	VIVIN NAHARANI, S. AP	PNS	III/a - Penata Muda	S-1
9	DIAH KUSUMA HASTUTI, S.Ak.	PPPK	IX	S-1
10	SITI YULIANINGSIH, S.Pd.	PPPK	IX	S-1
11	ARIK SUGITO	TKB		SLTA
12	GALIH FARIED SANDY, S.Pd	TKB		S-1
13	MUHAMMAD LUTFI, S.HI	TKB		S-1
14	PRAYOGA UJI AL HAKIM, S.Kom	TKB		S-1
15	SON MUSTOFA, S.Pd.I	TKB		S-1
16	SUGENG HARIADI	TKB		SLTA

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang per 01 Oktober 2025 sebanyak 16 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 1 orang, pejabat fungsional sebanyak 1 orang, pejabat pelaksana sebanyak 8 orang, pejabat PNS sebanyak 8 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. dengan pegawai laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 3 orang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%

Sementara itu, anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000
2	Meningkatnya Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.026.000
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.110.452
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.405.746
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.550.000
6	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	20.819.134.000
	JUMLAH	21.003.546.198



2.2. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	9 Dok	75 %
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9 Laporan	75 %
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	75 %
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	20 Unit	77 %



6	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	20 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.



Tabel 2.4
Cost per outcome Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 - Tribulan III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.320.000	1.153.000	49,70%	1 Dok	1 Dok	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.026.000	21.480.000	69,23 %	12 Dok	9 Dok	75 %
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.210.452	2.135.500	50,72 %	3 Paket	3 Paket	100 %
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.900.000	34.166.500	71,33 %	12 Laporan	9 Laporan	75 %



4	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.800.000	397.353	8,28 %	12 Laporan	9 Laporan	75 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50.605.746	36.135.461	71,41%	12 Laporan	9 Laporan	75 %
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.900.000	21.600.000	83,40 %	1 Unit	1 Unit	100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17.650.000	11.870.000	67,25 %	26 Unit	20 Unit	77 %
6	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20.320.977.000	10.504.806.000	51,69 %	25 Dokumen	20 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	289.307.000	276.981.000	95,74 %	5 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	208.850.000	107.890.000	51,66 %	2 Dokumen	1 Dokumen	50%



2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggungjawab atas 6 (enam) kegiatan, yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Pada tribulan III Tahun 2025, evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Strategi yang Digunakan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Dilaksanakan pada tribulan I dan III Tahun 2025
2.	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Memfasilitasi pembayaran honorarium pejabat keuangan	Pembayaran honor dilaksanakan setiap bulan selama tahun 2025
3.	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Memfasilitasi bahan logistik kantor dan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dilaksanakan di Tribulan I
4.	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Memfasilitasi Pembayaran tagihan telepon, Belanja Jasa Tenaga Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Dilaksanakan setiap bulan
5.	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	Memfasilitasi penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional serta pemeliharaan peralatan kantor	Dilaksanakan setiap bulan selama tahun 2025
6.	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	Memfasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual, dan pembayaran Tenaga Administrasi	Dilaksanakan pada tribulan I sampai IV, dan Setiap Bulan untuk Pembayaran Tenaga Administrasi pada Tahun Anggaran 2025



		Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial dan Pembayaran Tenaga Administrasi	Dilaksanakan pada tribulan I sampai IV, dan Setiap Bulan untuk Pembayaran Tenaga Administrasi pada Tahun Anggaran 2025
		Memfasilitasi kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Dilaksanakan di tribulan I dan IV

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan;
3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai time schedule yang sudah ada;
4. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait;

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....



BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan Kinerja menyesuaikan Time Schedule;
3. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG
Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat


Ir. PAIMAN

NIP. 19670306 199202 1 001

Lumajang, 01 Oktober 2025
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat


AKHMAD FAISHOL, S.Sos

NIP. 19671005 199003 1 009



LAMPIRAN I

PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAHUN 2025



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD FAISHOL, S.Sos

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. PAIMAN

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Juli 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001


AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

No. (1)	Sasaran Progam (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Meningkatkan Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp. 2.320.000,-	APBD (DAU)
2. Meningkatkan Fasilitas Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 31.026.000,-	APBD (DAU)
3. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 52.110.452,-	APBD (DAU)
4. Meningkatkan Kualitas fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 55.405.746,-	APBD (DAU)
5. Meningkatkan Kualitas fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp. 43.550.000,-	APBD (DAU)
6. Meningkatkan Kualitas fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 20.819.134.000,-	APBD (DAU)
JUMLAH	Rp. 21.003.546.198,-	

Lumajang, Juli 2025

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYA SETDA
KABUPATEN LUMAJANG


Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN LUMAJANG


AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP. 19671005 199003 1 009



LAMPIRAN II

DOKUMENTASI KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TRIBULAN III TAHUN 2025

- PELAKSANAAN KEGIATAN NUZULUL QUR'AN



- PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN DAGING KURBAN



- PELAKSANAAN KEGIATAN TARAWIH DAN TADARUS BULAN RAMADHAN



- PELAKSANAAN KEGIATAN PELEPASAN JAMAAH HAJI



- PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI



- PELAKSANAAN KEGIATAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI



- PELAKSANAAN KEGIATAN TAKBIR IDUL FITRI



- PELAKSANAAN KEGIATAN SILATURRAHMI BERSAMA ANAK YATIM



- PELAKSANAAN KEGIATAN MTQ TINGKAT PROVINSI

